

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Tinjauan Pustaka

Peneliti telah melakukan serangkaian kajian dan telaah terhadap beberapa literatur untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan mengenai objek pembahasan, yakni analisis kebijakan. Lebih sempitnya lagi mengenai analisis kebijakan pengabdian di PUTM. Sepanjang pengamatan peneliti, dapat ditemukan beberapa penelitian lain yang membahas mengenai analisis kebijakan. Namun, perihalnya dengan analisis kebijakan pengabdian di PUTM, peneliti belum menemukan penelitian yang serupa.

Terdapat beberapa penelitian serupa namun tidak sama yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terkait analisis kebijakan seperti:

Skripsi Beta Pujangga Mukti mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2016 dengan judul *Efektifitas Kebijakan Pendekatan Programmatic Dengan Pendekatan Movement Dalam Penyediaan Akses Layanan Pendidikan*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reasearch*) yang bersifat kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengukur sejauh mana efektifitas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan program (*programmatic*) dengan yang dilakukan oleh Lembaga Sumber Daya Masyarakat melalui pendekatan gerakan (*movement*).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah sama-sama mengkaji bagaimana keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Perbedaannya adalah penelitian diatas hanya membatasi pada tahap implementasi suatu kebijakan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada seluruh aspek adanya suatu kebijakan.

Skripsi Dewi Umaroh mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta jurusan Pendidikan Agama Islam tahun 2016 dengan judul *Model Pengembangan Soft Skill Dalam Pembentukan Karakter Ulama Di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Putri Yogyakarta*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan salahs satu aspek yang terdapat dalam lembaga Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah kaitannya dengan pengembangan *Sof Skill* pada lembaga tersebut.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama menjadikan Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah sebagai obyek penelitian. Perbedaannya adalah penelitian diatas meneliti tentang *soft skill* yang terdapat pada PUTM, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang salah satu kebijakan yang terdapat pada lembaga tersebut

Skripsi Tukinem mahasiswa jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul *Analisis Kebijakan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Dan Peraturan*

*Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Evaluasi USBN PAI.* Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*). Peneliti menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini meneliti secara spesifik mengenai analisis kebijakan yang ditekankan kepada evaluasi Peraturan pemerintah dan peraturan menteri Agama dalam hal USBN PAI.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama menganalisis kebijakan. Hanya saja terdapat perbedaan dalam hal objek kebijakan yang diteliti.

Skripsi Kamal Fuadi mahasiswa Program Studi Manajemen Pendidikan Jurusan kependidikan Islam Fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011 dengan judul *Analisis kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Provinsi Jakarta.* Peneliti menyimpulkan bahwa penelelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di lingkungan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dengang menghasilkan penelitian bahwa kebijakan Inklusif yang ada di lembaga pendidikan di Jakarta cenderung menyatukan program sekolah mereka dengan sekolah anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama ingin mengidentifikasi sejauh mana kebijakan diterapkan dan bagaimana dampak dari suatu kebijakan yang diterapkan. Letak perbedaanya adalah pada objek penelitian, penelitian ini menganalisis kebijakan Pendidikan Inklusif di

Jakarta sedangkan penelitian di atas mengkaji tentang kebijakan lembaga PUTM yang ada di Yogyakarta.

Skripsi lainnya seperti yang dikaji oleh Benny Fitrianto mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2010 dengan judul *Analisis Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan SMK Negeri Dan Swasta Di Kota Yogyakarta Periode 2006-2008 (Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Yogyakarta)*. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menemukan kesimpulan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan Peningkatan kualitas SMK di Yogyakarta berjalan dengan optimal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama meneliti sejauh mana optimalisasi dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini berfokus pada lembaga PUTM guna menganalisis kebijakan pengabdian yang ada didalamnya.

Ilhami Dyah Puspitoningrum mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret tahun 2009 dengan judul *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di SMP Negeri 1 Polokartu Tahun Ajaran 2008/2009*. Skripsi ini membahas mengenai implementasi dari kebijakan pendidikan gratis dengan kesimpulan bahwa dalam implementasinya,

kebijakan pendidikan gratis di Polokarto telah berjalan dengan baik. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah meneliti tentang kebijakan, hanya saja penelitian ini memfokuskan pada kebijakan pendidikan gratis, sedangkan penelitian di atas memfokuskan objek penelitian pada kebijakan pengabdian di PUTM.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, dari sekian banyak penelitian yang telah ada, sejauh ini penulis menemukan bahwa penelitian terkait kebijakan pendidikan masih sangat terbatas dan sedikit, terkhusus penelitian yang membahas tentang analisis kebijakan pengabdian di PUTM. Maka dari ini peneliti ingin mencoba hal tersebut sebagai bahan kajian dalam penelitian Skripsi ini. Dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada buku-buku yang berkaitan dengan kebijakan secara umum, dan juga buku-buku yang berkaitan dengan kebijakan pengabdian yang ada di PUTM. Peneliti juga mengumpulkan sumber data dari pihak-pihak tertentu pada lembaga PUTM guna memberikan informasi mengenai kebijakan pengabdian di PUTM.

## **B. Kerangka Teoritik**

Pada kerangka teoritik ini peneliti memberikan gambaran secara ringkas landasan teori yang menjadi pijakan dan sandaran dalam membahas tentang analisis kebijakan pengabdian di PUTM.

## 1. Kebijakan

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu *policy*, dan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Polis* artinya kota (*city*). Istilah kebijakan juga sering disebut dengan kebijaksanaan (*Wisdom*), penggunaan kata *wisdom* dianggap tidak tepat oleh berapa pakar karena *wisdom* memiliki makna tersendiri dalam bahasa Indonesia. Menurut Syafaruddin (2008:75) kebijakan disebut (*policy*) berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Anderson (2006: 6) menjelaskan bahwa kebijakan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan difokuskan untuk mencapai kepentingan bersama.

*Policy* diartikan juga sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, atau sebuah ketetapan pemerintah yang berkenaan dengan kehidupan publik. Kebijakan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang mengataur sumber daya publik dan manusia demi kepentingan umat banyak. Kebijakan merupakan hasil dari adanya kumpulan gagasan dan ide terkait kepentingan-kepentingan yang mewakili

sistem politik suatu Negara demi kepentingan orang banyak. (Hasbullah, 2007: 37-38).

Kebijakan dapat dimaknai pula sebagai rancangan suatu program, ide dan juga gagasan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah (Ramdhani dan Ramdhani, 2017: 2).

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan-keputusan dan juga agenda-agenda yang dibuat dan disahkan oleh pihak tertentu, berdasarkan pada suatu permasalahan. Yang dalam penerapannya memiliki sisi positif dan negatif namun tetap berdasarkan pada asas yang paling utama, yaitu demi kepentingan masyarakat banyak.

Umumnya terdapat 2 jenis kebijakan, yaitu kebijakan publik (*public policy*) dan kebijakan privat (*private policy*). Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tertentu yang diimplementasikan guna memberikan perubahan lebih baik bagi masyarakat banyak. Ada beberapa hal pokok yang terkandung dari kebijakan publik ini, (James E). Anderson, yaitu: kebijakan publik memiliki tujuan yang berawal dari sebuah persoalan/masalah, selanjutnya kebijakan publik melibatkan aksi dari pemerintah, dan kebijakan publik bisa memiliki makna positif jika dijalankan oleh pemerintah dan negatif jika dibiarkan saja oleh pemerintah.

Kebijakan privat biasanya dibuat oleh suatu lembaga milik perseorangan atau lembaga swasta milik organisasi tertentu yang hanya mengikat pada masyarakat tertentu pula (Sutapa, 2008: 13).

Para pakar ilmu politik juga merumuskan kebijakan publik ke dalam beberapa kategori (Hasbullah, 2007: 52):

- a. Kebijakan substantif.
- b. Kelembagaan
- c. Kebijakan menurut kurun waktu tertentu.

Kebijakan pendidikan dikenal juga sebagai *educational policy*. (Hasbullah, 2015: 40). Carter V. Good (1959) berpendapat sebagaimana dikutip oleh Imron (2002: 14) bahwa kebijakan pendidikan merupakan pertimbangan yang disandarkan pada suatu sistem guna menciptakan pendidikan yang lebih baik dan bermutu. Kebijakan pendidikan di sini dimaksudkan adalah seperangkat aturan sebagai bentuk keberpihakan dari pemerintah dalam upaya membangun satu sistem pendidikan sesuai dengan tujuan dan cita-cita yang diinginkan bersama. (Hasbullah, 2015: 41).

Kebijakan pendidikan dianggap sebagai kebijakan publik. Hal ini dikarenakan dalam sudut pandang manusia, filsafat politik, sosial, ekonomi dan budaya dapat diketahui bahwa pendidikan pada dasarnya merupakan usaha untuk membentuk manusia menjadi lebih baik, baik secara keilmuan,

sikap, dan juga emosional. Juga dengan adanya pendidikan maka manusia mampu mengangkat derajat kehidupannya dalam kehidupan sosial dan politik dan juga mampu menjaga adat dan budayanya dalam kehidupan nyata. Serta dengan pendidikan manusia akan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Oleh karenanya menjadi jelas bahwa kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pendidikan dapat disebut sebagai kebijakan publik karena menyangkut akan kehidupan manusia secara luas beserta lingkungan yang mereka hadapi (Bakry, 2010: 4).

Kebijakan pendidikan memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah kebijakan pendidikan harus dirumuskan oleh pihak yang berwenang. Pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah pihak yang mengatur jalannya pendidikan, pengelola lembaga pendidikan, dan pejabat yang memiliki kepentingan terhadap lembaga pendidikan.

Kebijakan pendidikan juga harus memiliki dasar yang kuat. Dasar kebijakan pendidikan haruslah berupa landasan hukum yang dibentuk berdasarkan kebijakan pendidikan itu sendiri. Tilaar dan Nugroho (Tilaar dan Nugroho, 2009: 16-17), mengemukakan bahwa yang menjadi dasar suatu kebijakan pendidikan adalah penggunaan akal untuk menemukan kebijakan yang bagus untuk pendidikan.

Pendalaman tentang kebijakan pendidikan memiliki 3 kegunaan, yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik (Dye, 1981).

Adapun analisis kebijakan yang ada dalam penelitian ini adalah berupa kebijakan pendidikan yang bersifat privat. Artinya kebijakan yang dibuat berdasarkan ketentuan dari pihak pengelola pendidikan bagi peserta pendidikan untuk bisa dijalankan dan dipatuhi hanya bagi mereka yang bernaung dan memiliki hubungan dengan lembaga terkait.

## 2. Tahapan Dalam Pembuatan Kebijakan

Tahapan dalam pembuatan suatu kebijakan pendidikan dimulai dengan tahap perencanaan atau agenda kebijakan (Formulasi kebijakan) atau latar belakang suatu kebijakan dibuat, selanjutnya dilanjutkan pada tahap pengesahan, lalu pada tahap pelaksanaan atau implementasi serta diakhiri dengan tahap penilaian dan evaluasi (Dunn, 1998: 24)

Agenda Kebijakan dan tahapan perencanaan adalah langkah paling awal dalam membuat satu kebijakan. Langkah ini merupakan hal yang paling dasar dalam pembuatan kebijakan. Pada tahap ini pembuat kebijakan akan mengemukakan atau menemukan masalah terkait mengapa suatu kebijakan harus dibuat. Masalah yang ada akan dijadikan bahan pembahasan dan selanjutnya akan dibahas oleh pihak berwenang, disahkan

dan dijadikan suatu kebijakan. Pada tahap ini pembuat kebijakan akan terlebih dahulu mengemukakan alasan-alasan mengapa suatu kebijakan yang akan diterapkan akan dibuat. Setelah alasan tersebut diterima oleh pihak-pihak tertentu.

Terkait perumusan suatu kebijakan, ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan, yaitu (Rohman, 2009: 114-118):

- a. Pendekatan *Social Demand Approach* (kebutuhan sosial). Merupakan pendekatan yang digunakan ketika masyarakat banyak menuntut pihak pemerintah untuk mengambil suatu kebijakan dikarenakan sangat dibutuhkan dan sangat mendesak.
- b. Pendekatan *Man-Power Approach*. Merupakan pendekatan kebijakan yang digunakan untuk menciptakan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik tanpa adanya tuntutan dan paksaan dari masyarakat sendiri.

Kebijakan pendidikan dirumuskan secara hati-hati, dan perumusannya dilandasi oleh suatu paham teori tertentu. Dalam proses perumusan kebijakan pendidikan, Hudson (Rohman, 2012), mengelompokkan teori kebijakan pendidikan ke dalam lima teori, yaitu teori radikal, advokasi, transaktif, sinoptik, dan teori inkremental (Hasbullah, 2015: 70).

a. Teori radikal

Teori ini menekankan kebebasan lembaga lokal dalam menyusun sebuah kebijakan pendidikan. Semua kebijakan pendidikan yang menyangkut penyelenggaraan dan perbaikan penyelenggaraan pendidikan di tingkat daerah diserahkan kepada daerah. Menurut teori radikal, negara atau pemerintah pusat tidak perlu repot-repot menyusun sebuah rencana kebijakan pendidikan bila pada akhirnya kurang sesuai dengan kondisi lokal. Apalagi kondisi masing-masing daerah memiliki tingkat keragaman dan kekhasan sendiri-sendiri yang tidak bisa disamakan satu sama lain.

b. Teori advokasi

Teori ini lebih mendasarkan suatu kebijakan yang dibuat pada argumentasi yang rasional, logis dan bernilai.

c. Teori transaktif

Penekanan pada teori ini adalah perumusan kebijakan sangat perlu didiskusikan secara bersama terlebih dahulu dengan semua pihak.

d. Teori sinoptik

Teori sinoptik ini lebih menekankan bahwa dalam menyusun sebuah kebijakan agar menggunakan metode berpikir sistem. Objek yang dirancang dan terkena kebijakan, dipandang sebagai satu kesatuan yang satu.

e. Teori inkremental

Teori ini menekankan pada perumusan kebijakan pendidikan yang berjangka pendek serta berusaha menghindari perencanaan kebijakan yang berjangka panjang.

Proses pembuatan kebijakan pendidikan dilakukan secara bertahap, di mana diantara tahapan yang satu dengan tahapan yang lainnya saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, tahapan-tahapan dari suatu kebijakan pendidikan yaitu dimulai dari perumusan masalah, identifikasi alternatif solusi, penilaian alternatif, seleksi alternatif, implementasi kebijakan dan kembali kepada perumusan masalah. Di sela-sela tahapan-tahapan tersebut terdapat sebuah aktivitas evaluasi dan interpretasi (Hasbullah, 2015: 65-66).

Tahap selanjutnya adalah Formulasi dan Legitimasi Kebijakan. Tahapan ini dimulai setelah agenda kebijakan telah dibahas oleh pihak terkait, maka tahapan berikutnya adalah membuat formulasi kebijakan. Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya

untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah.

Anggota yang terlibat dalam proses formulasi, menurut Peters (dalam Mada, 1985: 165) terbagi dalam:

- a. Birokrasi publik. Mereka merupakan pihak yang paling utama dalam menentukan suatu kebijakan.
- b. Pakar-pakar kebijakan non-pemerintahan yang memiliki keahlian dalam hal kebijakan dan diakui oleh pemerintah.
- c. Kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan.
- d. Anggota dewan yang memiliki hak istimewa kaitannya dengan suatu kebijakan.

Sebelum kebijakan diterapkan, terlebih dahulu kebijakan harus di legitimasi atau disahkan sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat ketika diterapkan nanti. Legitimasi memiliki pengaruh yang besar guna meninjau sejauh mana kebijakan mempengaruhi kehidupan orang banyak.

Terdapat beberapa tipe legitimasi yang umum digunakan pemerintah dalam melegitimasi suatu kebijakan sebagai berikut (Hasbullah, 2015: 75):

- a. Legitimasi oleh lembaga legislatif.
- b. Eksekutif

- c. Lembaga peradilan.
- d. Legitimasi oleh masyarakat.

Tahap implementasi kebijakan, evaluator akan melihat bagaimana realisasi akan kebijakan yang telah dibuat, apakah telah sesuai dengan tujuan awal suatu kebijakan yang telah ditetapkan ataupun telah berganti arah (Grindle, 1980:6). Implementasi merupakan tahapan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Dalam implementasi terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu, formulasi tujuan kebijakan harus jelas begitu pula kelompok sasaran; siapa yang berperan; dan bagaimana kebijakan tersebut harus dilaksanakan. Terdapat 3 jenis implementasi kebijakan :

- a. Implementasi yang terfokus pada dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan yang telah dibuat.
- b. Implementasi kebijakan yang terfokus pada penentu serta pelaksana suatu kebijakan, 2 model yang sangat umum dalam implementasi kebijakan ini adalah pendekatan *top-down* dan *bottom-up* (Prastyanti, 2015: 104).
- c. Implementasi yang bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai hasil dari suatu kebijakan yang telah diimplementasikan di masyarakat.

Tahap akhir dari suatu kebijakan adalah proses penilaian dan evaluasi. Didalamnya memuat penilaian akan suatu kebijakan telah berhasil dilaksanakan secara maksimal atau belum. Selanjutnya setelah dinilai maka akan dievaluasi guna memperbaiki kebijakan yang telah ada. Kebijakan yang telah diaplikasikan pada masyarakat, memerlukan evaluasi untuk menilai apakah kebijakan yang telah disusun tersebut memberikan dampak yang baik atau sebaliknya. Evaluasi sangat diperlukan, khususnya bagi pemerintah terutama untuk menentukan apakah kebijakan atau program tersebut dapat dilanjutkan, direvisi atau dimodifikasi.

### 3. Analisis Kebijakan

Analisis merupakan proses ilmiah yang dilakukan dengan berdasar pada fakta-fakta yang valid. Analisis juga dapat dilakukan penilaian/percobaannya secara empiris. Analisis akan memberikan kepastian dalam pengambilan keputusan yang dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasar fakta-fakta yang relevan (Agus, 2015: 30). Sedangkan analisis kebijakan adalah suatu proses penilaian terhadap kebijakan dengan berbagai data valid yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa analisis merupakan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan suatu dugaan sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian yang merupakan hasil pengamatan, percobaan, dan sebagainya.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam analisis terhadap kebijakan adalah (Sanusi, 2015: 167):

- a. Batasan sebuah kebijakan, analisis yang fokus pada bagaimana, mengapa, dan kapan serta diperuntukkan bagi siapa sebuah kebijakan itu dirumuskan.
- b. Isi kebijakan. Yaitu analisis yang melihat deskripsi dari kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut dibuat, serta memiliki hubungan dengan kebijakan yang telah ada sebelumnya.
- c. Monitoring dan evaluasi kebijakan. Yaitu analisis untuk menguji apakah kebijakan tersebut sesuai dengan tujuannya dan seberapa besar dampak kebijakan tersebut bagi permasalahan pendidikan.

Dengan demikian, maka aspek-aspek yang perlu dikaji dalam analisis terhadap kebijakan pendidikan meliputi batasan kebijakan, isi, serta monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan tersebut. Ketiga aspek tersebut perlu diperhatikan agar dapat diketahui penerapan dan muatan kebijakan pendidikan agar sesuai dan tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan.

Kesimpulan yang dapat dipahami bahwa, analisis kebijakan adalah penelitian yang secara tersusun guna mengetahui secara pasti dampak dan akibat dari suatu kebijakan. Hal ini agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan

masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan (Dunn, 2000: 95-97).

Penelitian mengenai kebijakan dilakukan guna mengetahui latar belakang suatu kebijakan dibuat, apa tujuan yang dimiliki, serta bagaimana pengimplementasiannya serta kendala-kendala yang didapati, juga turut diketahui bagaimana respon masyarakat yang dikenai kebijakan tersebut.

Terdapat beberapa jenis analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu kebijakan, yaitu (Dunn, 2000: 117-124):

a. Analisis kebijakan prospektif

Analisis kebijakan prospektif merupakan analisa suatu kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu yang titik fokus analisisnya adalah pada titik konsekuensi-konsekuensi sebelum dan sesudah kebijakan itu dibuat. Dengan kata lain analisis kebijakan prospektif mampu menilai bagaimana suatu kebijakan memberikan dampak sebelum dan sesudah adanya kebijakan tersebut. Model ini biasanya disebut sebagai model prediktif.

b. Analisis kebijakan retrospektif

Analisis kebijakan retrospektif adalah analisis kebijakan yang titik pentingnya berada pada akibat-akibat dari suatu kebijakan setelah kebijakan tersebut ditetapkan dan diimplementasikan. Analisa ini biasanya disebut sebagai analisa evaluatif.

c. Analisis kebijakan integratif

Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif, yaitu analisis kebijakan dimulai dari agenda pembuatannya sampai kepada kebijakan diterapkan dan dievaluasi, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan tersebut.

Suharto (2005: 87) mengemukakan umumnya analisis kebijakan fokus kajiannya pada tiga hal. Ketiga fokus tersebut merupakan pijakan yang dipedomani dalam melakukan analisis kebijakan. Tiga fokus tersebut, yaitu defenisi masalah yang membuat adanya suatu kebijakan, implementasi kebijakan, dan di akhiri dengan akibat-akibat yang ditimbulkan dari adanya kebijakan.

Adapun analisis kebijakan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis analisis kebijakan Integratif yaitu analisis kebijakan dimulai dari agenda pembuatannya sampai kepada kebijakan diterapkan dan dievaluasi, serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh adanya kebijakan tersebut.